

PROPOSAL USULAN KEGIATAN TAHUN 2019
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA PROV. JATENG

PROGRAM : Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
ANGGARAN : Rp. 200.000.000,-

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan di Jawa Tengah, meningkatnya produksi pangan pokok menjadi sasaran utama yang harus diwujudkan. Peningkatan produksi pangan akan dapat terwujud dengan adanya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian yang memadai.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengimplementasikan Program dari Kementerian Pertanian dalam hal modernisasi petani dalam bidang perbankan dengan program unggulannya yaitu "**Kartu Tani**" yang pada program awalnya digunakan untuk pembelian pupuk, selanjutnya berkembang dengan berbagai fungsi yang dapat membawa petani ke arah modernisasi petani.

Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap harga pupuk, dengan harapan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau untuk meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pupuk sebagai barang bersubsidi dalam pelaksanaan di lapangan tentu akan rawan dengan penyimpangan. Oleh karena itu agar pelaksanaannya tepat sasaran dengan indikator tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang telah dibentuk, baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Program Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani telah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian Indonesi (SINPI) yang telah diberlakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mulai 1 Januari 2018 yang selanjutnya akan dikembangkan kearah pemasaran hasil pertanian dengan sistem digital dengan harapan petani akan dapat menjual produk pertanian dengan harga yang pantas sehingga petani dapat menikmati hasil pertaniannya.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, terutama di sektor pertanian, masih banyak petani yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, yang diperkirakan terjadi karena kepemilikan lahan yang terlalu sempit ataupun

dikarenakan lahan yang dimiliki terlalu kritis sehingga tidak menghasilkan bila diusahakan untuk lahan pertanian. Salah satu upaya dalam menuntaskan kemiskinan di Jawa Tengah perlu disusun suatu kebijakan yang dapat menuntaskan kemiskinan di desa miskin dilihat dari kepemilikan lahan pertanian.

Dalam meningkatkan jaringan pemasaran produk pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai lahan pertanian yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk pameran. Melalui even pameran yang dilaksanakan di Soropadan diharapkan dapat meningkatkan jejaring pemasaran ke seluruh tanah air, bahkan sampai ke manca negara. Soropadan dikelola oleh beberapa SKPD Provinsi Jawa Tengah dan BPTP Jawa Tengah, agar Soropadan dapat lebih memberikan manfaat yang lebih besar maka Soropadan tidak hanya sebagai area pameran tetapi perlu dikembangkan ke arah yang lebih luas, terkait hal itu perlu disusun kebijakan pengelolaan Soropadan.

Sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, peran lembaga sangat dibutuhkan, saat ini lembaga tani/nelayan yang ada cukup banyak namun belum ada wadah yang dapat menyatukan mereka. Kelembagaan pertanian yang ada antara lain KTNA, HNSI, HKTI, dll. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibentuk suatu wadah sebagai ajang kelembagaan petani berkomunikasi dan berkoordinasi.

2. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka penyiapan bahan dan rumusan ringkas dalam penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan melalui peningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan bidang Peternakan di Provinsi Jawa Tengah
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam rangka penyusunan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
4. Menyusun Kebijakan Pengembangan Sistem Kartu Tani;
5. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Soropadan;
6. Menyusun Kebijakan Pengentasan Desa Miskin dilihat dari Kepemilikan lahan pertanian.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan meliputi Petani/Kelompok tani, Tim monev, pengecer/penyalur, distributor, Produsen saprodi, OPD Prov dan Kab/Kota, Kelembagaan Pertanian, Provinsi Jawa Tengah

4. KELUARAN (OUTPUT)

- a. Pengembangan sistem Kartu Tani
- b. Kebijakan Pengelolaan Soropadan
- c. Kebijakan program pengentasan Desa Miskin dilihat dari kepemilikan lahan pertanian,

5. MANFAAT

- a. Memiliki Data petani yang valid
- b. Pengembangan fungsi Kartu Tani untuk fungsi fungsi lainnya (edukasi, transaksi, informasi)
- c. Pemanfaatan Data petani untuk menentukan kebijakan dalam pemberian bantuan/subsidi kepada petani secara lebih tepat
- d. Terwujudnya peta kemiskinan berbasis kepemilikan lahan

6. DAMPAK (IMPACT)

Jumlah rumusan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

7. RENCANA PENGANGGARAN

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KETERANGAN
1.	Persiapan	a. Penyusunan RKO b. Persiapan pelaksanaan	
2.	Pelaksanaan	a. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan bidang Pertanian Perkebunan dan Peternakan b. Konsultasi, Koordinasi dan monev penyusunan kebijakan bidang Pertanian Perkebunan dan Peternakan c. Menyusun Kebijakan Pengembangan Sistem Kartu Tani; d. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Soropadan; e. Menyusun Kebijakan Pengentasan Desa Miskin dilihat dari Kepemilikan lahan pertanian	
3.	Pelaporan	Penyusunan rumusan ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pertanian Perkebunan dan Peternakan	3 dokumen

PENUTUP

Proposal kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019, sehingga keluaran yang dihasilkan dapat mendukung capaian program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2018

KEPALA BAGIAN KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN

Ir. DIAH KUSUMARINI, MSi
NIP. 19610404 198603 2 009